

Berita Lingkungan Hidup

Lingkungan di Paniai Rusak, Pemprov Harus Bertanggung Jawab

HINGGA kini kerusakan lingkungan akibat tambang liar masih marak di Paniai, Papua. Hal itu dipicu adanya penggalian dan pendulangan emas secara liar yang dilakukan para pengusaha tambang liar.

Data dewan adat Pania mencatat ada sebanyak 40 pengusaha tambang liar yang kini berada di lokasi pendulangan emas di sepanjang Sungai Degeuwo/Kemabu, Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai.

Menurut ketua adat Paniai, John Gobai, pendulangan itu telah berlangsung sejak akhir 2002 dan dimulai dari Tagipige dan sudah menyebar hingga sungai Degeuwo yang merupakan wilayah adat Suku Mee dan Suku Wolani.

Hal itu telah membuat kerusakan lingkungan berupa hutan dan sungai serta kini ditambah dengan keancuran moral masyarakat, karena adanya tempat lokalisasi dan tempat hiburan kafe yang tidak resmi.

Kata Gobai, pihak adat sudah berupaya mengadakan pendekatan dengan jalan musyawarah bersama pemerintah kabupaten Paniai dan Nabire, pihak keamanan, LSM, bahkan para pengusaha tersebut. Dan hasil musyawarah bersama itu telah disampaikan juga kepada pemerintah Provinsi Papua dan Polda Papua, namun hingga kini belum ada penyelesaian.

Hasil musyawarah bersama itu antara lain meminta pemprov Papua melalui Pemkab Paniai dan Nabire serta Polres Paniai dan Nabire untuk bersama lembaga adat melakukan penutupan lokasi-lokasi pendulangan emas ilegal dan penutupan *helipad* di daerah pelosok Paniai yang belum memiliki izin dari pemda Paniai sambil melakukan persiapan-persiapan dan atau pengaturan pendulangan emas yang menguntungkan masyarakat adat Paniai.

Selain itu meminta Polda Papua dan jajarannya untuk memanggil, meminta keterangan dan pertanggungjawaban para pelaku pendulangan emas ilegal yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan di sepanjang tanah adat Paniai.

Secara lembaga adat sudah kami berupaya lewat musyawarah dan mengantarkan hasilnya langsung ke pemprov dan pihak terkait lainnya, namun usaha itu sudah hampir satu tahun ini belum dapat tanggapan apalagi perhatian, kata John Gobai kepada Jurnal Nasional di Biak, Senin (5/4).

Kini pihaknya kembali akan menyurati Gubernur Papua, Kapolda Papua dan semua pihak terkait untuk meminta tanggungjawabnya terhadap kerusakan lingkungan tanah adat di Paniai.

"Secara tegas kami meminta pertanggungjawaban mereka", ujarnya. n Opin Tanati